

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Tujuan dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini dilakukan untuk mengetahui apakah dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan yang tertera di PMK Nomor 206/PMK.07/2020 serta tidak lupa terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai yang diiringi beberapa kendala dan masalah dalam penyalurannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif terkait data primer dan sekunder yang telah didapatkan melalui studi pustaka dan wawancara kepada pegawai Sekretariat Daerah Sleman dan para buruh tani tembakau/pabrik rokok. Data yang didapatkan tersebut nantinya diperoleh kesesuaian antara laporan realisasi yang ada dipemerintahan dan data di lapangan.

Berdasarkan uraian data dan fakta yang didapat dari hasil penelitian yang telah diolah penulis terkait dengan penyaluran DBH CHT untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Sleman Tahun 2021 dapat diuraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dari tiga bidang CHT yang telah dijabarkan di atas, bidang yang berkontribusi lebih banyak terhadap penanganan dampak pandemi ini yaitu bidang kesejahteraan masyarakat. Bidang kesejahteraan masyarakat ini ternyata sangat membantu buruh yang terdampak perekonomiannya karena pandemi ini. Bantuan yang paling memperingan kebutuhan para buruh tersebut terkait adanya penyaluran bantuan langsung tunai. Sedangkan, bidang penegakan hukum dan bidang kesehatan tidak terlalu banyak kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19 ini. Bidang kesehatan hanya berfokus pada upaya pemerintah dalam memperkuat jaminan kesehatan nasional.

Dari ketiga bidang yang terdapat dalam program penyaluran DBH CHT tersebut, tidak ada bidang yang menyalahi tujuan dan prinsip yang ditetapkan dalam PMK terkait DBH CHT. Program-program yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Sleman telah sesuai dengan PMK Nomor.206/PMK.07/2020 yang mana tujuannya memprioritaskan upaya menangani dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Realisasi DBH CHT sebesar 98,73 % ini membuktikan bahwa penyaluran DBH CHT di Kabupaten Sleman telah efektif dan berjalan baik.

2. Mekanisme penyaluran dana bantuan langsung tunai ini diawali dengan adanya usulan data buruh tani oleh dinas pertanian dan data buruh pabrik rokok oleh dinas tenaga kerja. Kemudian, data tersebut nantinya diverifikasi untuk dilakukan penetapan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Lalu, nantinya dana tersebut disalurkan melalui Bank Daerah Sleman. Dengan adanya

data terkait realisasi penyaluran BLT sebesar 99,18% menunjukkan bahwa penyaluran BLT di Kabupaten Sleman berjalan dengan efektif. Bantuan langsung tunai ini ternyata sangat efektif dalam membantu keluarga buruh yang mengalami penurunan pendapatan bahkan pemutusan hubungan kerja. Sehingga, dengan adanya bantuan ini bisa memperingan biaya kebutuhan yang diperlukan buruh dalam kesehariannya.

3. Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang terealisasi 99,18% menunjukkan tidak ada kendala dalam penyaluran bantuan langsung tunai. Data lapangan yang diperoleh juga memberikan keakuratan terkait minimnya kendala yang signifikan dalam penyalurannya. Namun, masalah yang terjadi justru pada kurangnya sosialisasi terkait adanya perbedaan nominal BLT DBH CHT antar kabupaten dan ketidaktahuan para buruh bahwasannya buruh yang telah menerima bantuan lain tidak bisa menerima BLT DBH CHT.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dituliskan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, sebaiknya diperlukan sosialisasi yang lebih optimal terutama yang membahas terkait perbedaan nominal BLT. Perbedaan nominal BLT tersebut dikarenakan dana bagi hasil tiap kabupaten berbeda. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai alasan mengapa adanya perbedaan nominal harus diberikan penjelasan yang mudah dipahami dan bisa dimengerti oleh kalangan buruh tani dan buruh rokok. Selain itu, diperlukan juga penjelasan tentang buruh yang telah menerima bantuan lain tidak bisa menerima BLT DBH CHT ini karena nantinya akan memunculkan stigma buruk bagi pemerintah daerah.